

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DI DESA ARAS
KABUPATEN BATUBARA**

SKRIPSI

OLEH:

MONICA CHINDY WIDYA

NPM: 1403100043

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

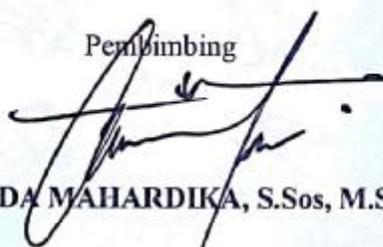
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : **MONICA CHINDY WIDYA**
NPM : 1403100043
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI
DESA ARAS KABUPATEN BATUBARA**

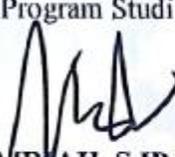
Medan, April 2018

Pembimbing


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi


NALIL KHAIRAH, S.IP, M.Pd

Dekan,




Dr. R. PIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : **MONICA CHINDY WIDYA**
NPM : 1403100043
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S. Sos, M.Si**
PENGUJI II : **MUJAHIDDIN, S. Sos., M.SP**
PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP**

(.....)
(.....)
(.....)

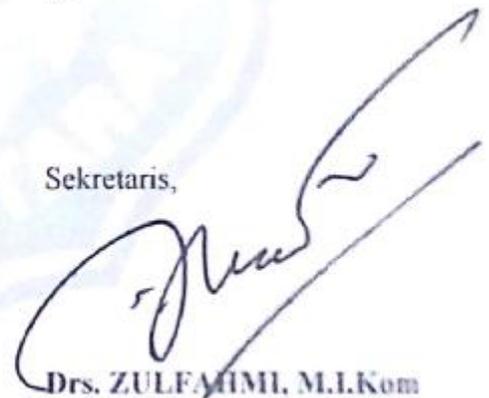


PANITIA UJIAN

Petua,

Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris,

Drs. ZULFAIMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Monica Chindy Widya, NPM 1403100043, menyatakan
sesungguh-sungguhnya:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk apapun yang dilarang oleh undang-undang, termasuk perbuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau menjiplak karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa didalam skripsi ini adalah karya dan tulisan sendiri, bukan karya orang lain atau kerja plagiat, jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak dapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan disepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.



Medan, .. Maret 2018

Monica Chindy Widya
MONICA CHINDY WIDYA



Unggul, Cerdas, dan Terpercaya
 Bila merujuk surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : MONICA CHINDY WIDYA
 NPM : 1403100043
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PEMBANGUNAN)
 Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA
 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA ARAS
 KABUPATEN BATUBARA.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22 JANUARY 2018	ACC PEDOMAN WAWANCARA	f.
2.	20 FEBRUARY 2018	PERBAIKAN ISI BAB IV	f.
3.	28 FEBRUARY 2018	PEJELAS klasif-peneftian di setiap kategorisasi	f.
4.	05 MARET 2018	Perbaikan setiap kalimat di bab iv	f.
5.	07 MARET 2018	ubah teori di pembahasan bab iv	f.
6.	08 MARET 2018	- Perbaiki isi bab iv - Perbaiki simpulan dan saran - Perbaiki abstrak	f.
7.	09 MARET 2018	Perbaiki abstrak	f.
8.	10 MARET 2018	ACC SKRIPSI	f.

Medan, MARET 2018...

Dekan,

Drs. Zulfahmi, M.Hum

Ketua Program Studi,

(NAIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd)

Pembimbing ke:

(ANANDA MAHARDIKA)

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA ARAS
KABUPATEN BATUBARA**

MONICA CHINDY WIDYA

1403100043

ABSTRAK

Desa Aras merupakan salah satu desa yang terletak Kabupaten Batubara. Desa Aras sama seperti desa lainnya yang merupakan salah satu desa yang menerima bantuan Alokasi Dana Desa dari pemerintah dalam meningkatkan pembangunan. Sehingga dengan adanya Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh satuan pemerintah dapat mengubah pembangunan yang ada di desa menjadi lebih baik dari sebelumnya seperti pada pembangunan fisik maupun non-fisik. Namun demikian apakah pemerintah desa beserta elemen-elemen desa mampu mengelola Alokasi Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Dengan melihat masalah yang timbul pada pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara . Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan menyajikan data-data yang telah didapat yang berupa dokumen, arsip dan juga refrensi lainnya yang diperoleh langsung dari desa tersebut. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu berjumlah 5 orang, dimana diantaranya nya 3 dari pemerintah desa dan 2 dari masyarakat. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan aloksi dana desa dalam upaya menungkatkan pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya pertanggungjawaban dari pemerintah terkait pembangunan yang belum terlaksana, banyaknya perencanaan pembangunan sangat tidak seimbang dengan anggaran dana desa yang tersedia sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya program yang sudah terencana. Adanya penyimpangan dalam program pembangunan juga merupakan salah satu masalah yang timbul karena tidak akuntabelnya pemerintah desa terhadap pembangunan tersebut. Tidak itu saja, kurangnya integrasi dan adaptasi antara pemerintah desa dan masyarakat juga penyebab ketidakberhasilan pembangunan di desa. Dengan begitu program pembangunan yang ada di Desa Aras Kabupaten Batubara dikatakan masih belum maksimal dan dalam pengelolaan alokasi dana desa nya belum akuntabel.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Program Pembangunan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kabar kepada manusia bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ilmu Administrasi Negara: Administrasi Pembangunan).

Dalam penelitian skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini, serta penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna. Adapun judul skripsi ini adalah **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Aras Kabupaten Batubara”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian dari penelitian ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis sangat senang menerima saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Yang paling istimewa Kedua Orangtua, Ayah tersayang Sudani Jasmadi dan Mamak tercinta Fitriani yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat dari awal kuliah sampai akhir kepada penulis, serta seluruh keluarga besar penulis yaitu adik-adik penulis Shylvia dan Dhea.
3. Bapak Drs. Agussani, M,AP. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Rudianto, M. Si selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Dosen dan seluruh Staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Para narasumber yang disertakan di dalam penelitian ini.

10. Untuk sahabat-sahabat tercinta sekaligus sahabat seperjuangan penulis selama di perkuliahan Dian Juwita, Rizka Amalia, Devi Andriani, Karminem, Tasya Anggraini, Musria, Mirna Jayustin Tanjung, Rofik Indra Lesmana, Asri Fahrizal , Adrian Dirga Putra Zebua dan Irfan Effendi.
11. Untuk My Sweet Home Gg Kerinci No 19b Wita, Dedek, Icha, Sasa, Intan, dan Tika yang selalu memberi semangat kepada penulis.
12. Makasih untuk Lolo yang sudah memberikan do'a dan semangat kepada penulis dari awal hingga selesai penyusunan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan selama bimbingan skripsi Pingki Hardiantika, Yogi Utami, Melati Muharani, dan Rohani.
14. Untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa/i stambuk 2014 yang tergabung dalam jurusan Ilmu Administrasi Negara.
15. Terima kasih kepada Alm. Drs. Bapak Tasrif Syam, M.Si yang telah memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya. Amin.

Medan, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN DAN TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
1. Konsep Akuntabilitas	10
a. Pengertian Akuntabilitas.....	10
b. Tipe Akuntabilitas.....	14
c. Jenis Akuntabilitas	15
d. Dimensi Akuntabilitas	16
2. Konsep Alokasi Dana Desa	18
a. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)	18
b. Tujuan Alokasi Dana Desa	21
c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	22
3. Konsep Pembangunan	25
a. Pengertian Pembangunan.....	24
4. Konsep Desa	26
a. Pengertian Desa.....	26
b. Komponen Desa	27
5. Konsep Pembangunan Desa	29
a. Pengertian Pembangunan Desa	29
b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa	32
c. Prinsip Pembangunan Desa	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Kerangka Konsep	35
C. Defenisi Konsep	36
D. Kategorisasi.....	38
E. Narasumber.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	42

1. Visi dan Misi Desa	42
2. Lagenda dan Sejarah Desa Aras	47
3. Kondisi Umum Desa	48
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Hasil Penelitian	67
B. Pembahasan	82
BAB V PENUTUP	89
A. Simpulan	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Bagan 3.1 Kerangka Konsep	36
Bagan 3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Aras	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Aras.....	49
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Aras	50
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Menurut Mata Pencaharian di Desa Aras	52
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Agama di Desa Aras	55
Tabel 3.5 Jumlah Tempat Ibadah di Desa Aras	56
Tabel 3.6 Daftar Nama Aparat Pemerintah Desa	58
Tabel 3.7 Daftar Nama Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa)di Desa Aras	64
Tabel 4.1 Kegiatan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Aras Kabupaten Batubara Tahun 2017	70
Tabel 4.2 Rekap Kegiatan Desa Aras Kabupaten Batubara	74
Tabel 4.3 Selisih Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2017	75
Tabel 4.4 Data Pembangunan yang belum terlaksana	77
Tabel 4.5 Data Pembangunan yang belum terlaksana	83
Tabel 4.6 Data Pembangunan yang belum terlaksana	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran II : Daftar Hasil Wawancara
- Lampiran IV : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran V : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran VI : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Mahasiswa dari kampus Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
- Lampiran IX : Surat Keterangan telah menyelesaikan Penelitian di Desa
Aras Kabupaten Batubara
- Lampiran X : SK-6 Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran XI : SK-7 Surat Pernyataan
- Lampiran XII : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah dan Pembangunan desa serta kota semakin seimbang dan juga serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota yang ada di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa dituntut dengan adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik

rakyat lokal. Sejak masa penjajahan Hindia, Belanda sekalipun pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. Disamping itu, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi masyarakat dengan pemegang kekuasaan (Perangkat Desa).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan dengan tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi dan penghidupan masyarakat.

Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/kota yang berdasarkan atas desentralisasi dalam mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan

pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota. Dan biasanya desa mendapatkan paling sedikit 10% (sepuluh persen). Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya, agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri dengan berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan wilayah itu sendiri. Dengan adanya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintahan Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintahan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dalam masalah pembangunan dan pemerintahan desa. pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Kabupaten Batubara tepatnya di Desa Aras. Desa Aras merupakan desa yang terletak di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dan sebagai salah satu objek penelitian. Desa aras memiliki penduduk yang berjumlah ±4.145 jiwa, Dimana Desa Aras jauh lebih banyak penduduknya dibandingkan dengan desa lainnya yang berada di Kabupaten Batubara khususnya di Kecamatan Air Putih. Desa Aras sendiri memiliki luas 820 hektare yang terdiri dari 9 (sembilan) dusun. Masyarakat di Desa Aras kebanyakan bekerja sebagai petani, tak heran jika banyak lahan pertanian di desa ini.

Penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Batubara lebih memfokuskan pada penerapan sistem akuntabilitas yang dilakukan tim pelaksana yang di bentuk masing-masing desa khususnya di Desa Aras. Penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dari semua kegiatan, dan paksa kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Batubara jumlahnya tidak sama atau bervariasi di setiap masing-masing desa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2015 tentang Formulasi Alokasi Dana Desa. Berdasarkan dari laporan keuangan Desa Aras pada tahun 2017, penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa tersebut memiliki jumlah Rp. 795.382.338,00. Maka munculah pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang cukup terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan. Akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri dengan kewenangan pemerintah desa. dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan secara mandiri maka diperlukan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara.

Namun dengan anggaran dana desa yang cukup besar masih ada pembangunan desa yang belum dilaksanakan, hal ini disebabkan banyaknya

program pembangunan yang telah terencana namun tidak terlaksana dengan sepenuhnya. Tidak itu saja, Pemerintah Desa juga menjanjikan bahwa di setiap dusun nya akan dilaksanakan pembangunan. Tetapi dengan kenyataan yang ada Pemerintah desa sendiri tidak sepenuhnya bertanggungjawab mengenai pembangunan tersebut terlebih dengan pembangunan yang tidak terlaksana. Kekecewaan yang ditunjukkan oleh masyarakat desa tidak terlalu di pedulikan oleh pemerintah desa. Dengan begitu masyarakat desa semakin kecewa dengan perlakuan dari Pemerintah Desa adapun yang menjadi program pembangunan yang tidak terlaksana seperti: Posyandu di Dusun I dan III, Perbaikan jalan di Dusun II, IV,V, Pembangunan Joging Track di Dusun III dan V, Posyandu di Dusun VII.

Dalam Penelitian ini Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memiliki program Alokasi Dana Desa (ADD) dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan dengan pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa disetiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian ini mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya meningkatkan pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara karena peneliti ingin mengetahui pertanggungjawaban dari kepala desa serta tim pelaksana dalam pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Aras Kabupaten Bara.

Dari penjelasan diatas, dengan demikian penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul “ **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Aras Kabupaten Batubara.**”

B. Rumusan Masalah

Sugiyono (2010:35) mengatakan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Aras Kabupaten Batubara?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa ada arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil yang diharapkan.

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi

Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Aras Kabupaten Batubara”.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a) Penelitian ini dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b) Hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi peniliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
- c) Untuk membangun serta menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi negara serta sebagai bahan bandingan bagi calon peneliti yang selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini berisikan serta menguraikan teori-teori tentang Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, dan Pembangunan Desa

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini mencakup dari Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Teknik Penentuan Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Penyajian dan Hasil Pengamatan dari Jawaban Narasumber-Narasumber.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

1. Konsep Akuntabilitas

a) Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Miriam Budiarjo (1998:78), akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna bertanggungjawab dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Kumorotomo (2005:95), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang

sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban agen (*pemerintah*) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi, 2010:23).

Moeheriono (2014:99) Akuntabilitas adalah kewajiban dalam pemberian pertanggungjawaban kepada pihak yang memberi, untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan atas hasil upaya dalam melaksanakan tugas atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Haryatmoko (2011:106) Akuntabilitas berarti pemerintahan harus bertanggungjawab secara normal, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Akuntabilitas dipakai untuk mengukur atau menilai apakah “mandate rakyat” dijalankan dengan baik.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) yang memiliki

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Muindro 2008:21)

Selanjutnya Abdul Halim (2012:20) Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan akuntabilitas yang merupakan perwujudan dari kewajiban mutu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Huages dalam Joko Widodo (2001:147) menegaskan bahwa *“Government Organisation are created by the public and to be accountability to if,”* (organisasi pemerintah dibuat oleh publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkannya pada publik). Adanya pertanggungjawaban tersebut, disebabkan karena aparatur pemerintahan dibebani kewajiban untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan, dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Sebagai konsekuensi dari adanya asas Negara hukum, baik menurut konsep *rule of law* maupun *rechtsstaat*, atau (*cinstitutional democracy*), maka pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku, dan tindakannya kepada rakyat, dalam kerangka menyelenggarakan, atau menjalankan fungsi pemerintahan. bersamaan dengan itu, Indonesia sebagai negara hukum didalamnya mengandung

pengertian adanya pengakuan pada prinsip *supremacy of law* dan *constitutionalism*, yang pada hakikatnya bahwa dalam Negara hukum, hukum harus menjadi penentu segala-segalanya sesuai dengan doktrin *the rule of law*. Dalam kerangka *the role of law* hukum harus diyakini adanya pengakuan, bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintahann (*aquality before the law*) dan berlakunya asas legalitas dengan segala bentuknya dalam praktek (*due process law*).

Dalam Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berdasarkan beberapa pengertian konseptual akuntabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas adalah suatu kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang pertanggungjawaban bahwa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per tahun Anggaran dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk Desa.

b) Tipe Akuntabilitas

Menurut Jabra dan Dwidevi dalam Sadu Wasistiono (2007: 50) mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu:

1. akuntabilitas administratif,
2. akuntabilitas legal,
3. akuntabilitas politik
4. akuntabilitas profesional,
5. akuntabilitas moral. Akuntabilitas administratif yaitu dimana didalamnya terdapat pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hirarki yang jelas. Akuntabilitas yang kedua yaitu akuntabilitas legal

yang merujuk pada domain publik yang dikaitkan dengan prosese legislatif dan yudikatif.

Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan akuntabilitas politik adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik gunanya untuk mengatur serta menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber yang menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.

Selanjutnya pada akuntabilitas profesionalisme, akuntabilitas ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Sedangkan akuntabilitas moral adalah tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja ataupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

c) Jenis Akuntabilitas

Menurut Saleh dan Aslam Iqbal (1995:65) akuntabilitas publik ada dua jenis diantaranya, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal yang mempunyai defenisi sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Internal

Pertanggungjawaban seseorang kepada Tuhannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya mengenai segala sesuatu yang

dijalankannya. Hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu Akuntabilitas internal disebut sebagai akuntabilitas spiritual. Akuntabilitas internal sangat sulit untuk diukur karena tidak adanya ukuran yang jelas dan diterima oleh semua orang serta tidak ada yang melakukan evaluasi dan memonitor dari sejak proses sampai pada pertanggungjawaban itu sendiri.

b. Akuntabilitas Eksternal

Pertanggungjawaban kepada lingkungannya, baik itu lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Akuntabilitas eksternal lebih mudah diukur mengingat norma dan standar yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian eksternal sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja.

d) Dimensi Akuntabilitas

akuntabilitas yang dilakukan pada sektor publik terdiri dari berbagai dimensi. Ellwood (2003:371) mengemukakan terdapat empat dimensi didalam akuntabilitas diantaranya:

a. Akuntabilitas Kejujuran Hukum

akuntabilitas kejujuran yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas ini merupakan proses yang berkaitan dengan masalah prosedur yang digunakan dalam tugas, sudahkah memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi? Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah. Akuntabilitas proses menstraformasikan input menjadi output. Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langsung tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berkaitan dengan unit-unit dan birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pemerintahan kepada publik.

Berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok.

2. Konsep Alokasi Dana Desa

a) Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Menurut Syahdan, dkk (2004:24) menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), karena Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Aspirasi yaitu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat, dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan atau aspirasinya kepada wakil-wakilnya.

- b. Partisipasi yaitu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDesa) harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam menyusun kebijakan dan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDesa). Pemerintahan Desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam mengambil keputusan.
- c. Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDesa), termasuk program pembangunan.
- d. Akuntabilitas yaitu Pemerintahan Desa mengelola keuangan sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada.

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda Kabupaten/kota atau Kepala Badan Keuangan Daerah (BPKD) atau kepala badan pengelolaan keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa dalam APBDDesa yang dilakukan secara

bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/Wali Kota. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. Perbaikan lingkungan dan permukiman;
- e. Teknologi tepat guna;
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Kegiatan lain yang dianggap penting

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa menurut Sadu Wasistiono (2007:112) adalah:

1. Rumusan Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa;

2. Hal yang sangat penting untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa adalah tersedianya data sebagai prasyarat untuk perhitungan;
3. Rumusan yang digunakan berdasarkan asas merata dan adil.
 - a. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa (BD_x) yang dihitung dengan rumusan dan variabel tertentu (misalnya: variabel kemiskinan, variabel keterjangkauan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
4. Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan oleh daerah.

b) Tujuan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa berasal dari perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota (PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11). Komponen Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10% (sepuluh persen dari pajak retribusi.

Adapun tujuan khusus dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

c) Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam rangka meningkatkan penyaluran dan kesejahteraan masyarakat desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten selanjutnya melalui kas Desa/rekening Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai kewenangan memuat kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan prasarana, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Menurut Hanif Nurcholis (2009:81) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa yang menentukan sukses atau tidaknya Pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan Desa adalah cerminan perkembangan Pemerintahan Desa, Desa dan juga Masyarakat Desa.

Sumber Keuangan Desa menurut PP. No. 6 Tahun 2014 Pasal 27 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri dari usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain dari pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain dari pendapatan desa yang sah.

Dari setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa merupakan realisasi daripada rencana kegiatan Pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun yang menjadi Penggunaan Dana Desa adalah:

- a. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
- b. Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas Penggunaan Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dana Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- c. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa.

3. Konsep Pembangunan

a) Pengertian Pembangunan

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan,

pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, dimana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan sehingga memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan serta merupakan bentuk dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

Siagian (2001:4) Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Menurut Sunarto (2000:62) Pembangunan adalah upaya yang terus menerus yang dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan perannya secara wajar sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sendiri sehingga keluar dapat berhubungan dengan serasi dan dinamis, sedangkan keluar dapat menciptakan keseimbangan.

Sedangkan menurut Nugroho (2004: 119) Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternative yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasi yang paling manusiawi. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada beragaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menurut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan dan adil.

Dalam hal ini harus diakui bahwa peran pemerintah dalam kegiatan pembangunan sangat penting dalam menentukan pembangunannya. Meski peran pemerintah itu penting, namun seluruh unsur masyarakat harus turut serta jika proses pembangunan itu hendak berjalan lancar.

Dengan demikian, proses pembanguna terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Maka sangat penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan ataupun perbaikan dan pertumbuhan/visifikasi.

4. Konsep Desa

a) Pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Indonesia Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Kepala Desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja dibidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakat terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Menurut PP No. 57 Tahun 2005 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Sedangkan menurut hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Komponen Desa

Wahjudin Sumpeno (2011:4) secara rinci menguraikan Komponen Desa sebagai berikut:

a. Sumber Daya Pertanian dan Lingkungan Hidup

Sebuah Perdesaan memiliki sumber daya pertanian dan lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan dan perekonomian masyarakat. Desa memiliki peran ganda sebagai penopang interaksi sosial dan peningkatan kesejahteraan, dan juga sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup yang menjadi hambatan sehingga berkelanjutan kepada pembangunan desa.

b. Perekonomian Wilayah Perdesaan

Perekonomian wilayah perdesaan menyangkut kebutuhan pasar diluar yang berupa komoditi primer dan sekunder. Keterkaitan ini mendorong pada integrasi kuat desa dengan wilayah lainnya. Ciri penting kegiatan pertanian yang maju dan menggunakan perlengkapan atau teknologi pendukung sederhana yang tersedia di wilayahnya. Pengelola perlu dilakukan secara intensif dengan tenaga kerja relatif banyak. Dalam hal ini pertanian harus dipasarkan ke luar daerah dengan bentuk olahan segar untuk memancing konsumen.

c. Kelembagaan Sosial

Kegiatan perekonomian di sebuah Perdesaan ditandai dengan eratnya hubungan antara petani, pedagang, peternak, pengelolaan sarana produksi pertanian lokal dan transportasi. Disamping itu, lembaga sosial yang ada seperti pada kelompok tani, kelompok pemuda, pemerintah desa badan permusyawaratan desa, pesantren

dan pendidikan formal, serta lembaga keuangan mikro berkaitan erat dengan peningkatan produksi pertanian dan kehidupan masyarakat setempat.

d. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan menjadi subjek atau pelaku utama yang menggerakkan roda perekonomian dan perubahan dalam jangka panjang.

e. Sarana dan Prasarana Fisik

Disamping aktivitas sosial dan kelembagaan, Desa ditunjang pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung percepatan pembangunan dan perekonomian masyarakat serta untuk meningkatkan hubungan dan jaringan antara satu desa dengan desa yang lainnya.

5. Konsep Pembangunan Desa

a) Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang berbasis pedesaan dengan mengutamakan kearifan lokal masyarakat pedesaan. Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat pondasi perekonomian negara, mempercepat penuntasan kemiskinan dan pengangguran kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial dan desa sebagai basis perubahan sosial. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga Desa menjadi

tempat yang menarik sebagai tempat tinggal mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus dapat dibutuhi sehingga memungkinkan desa menjadi maju dan berkembang.

Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan gotong-royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan (Tjahja Supriatna 2000:10)

Damsar (2016), Pembangunan perdesaan merupakan suatu proses perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anggota masyarakat perdesaan secara keseluruhan. Pembangunan perdesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat perdesaan secara holistik komperhensif meliputi aspek ekonomi, sosial politik, budaya, agama, petahanan dan keamanan.

Marbun (1998:34) Pembangunan desa hanya mungkin berhasil dengan:

1. Adanya rencana yang baik, masuk akal, dan dapat direalisasikan dalam waktu yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan;

2. Tersedianya sumber tenaga manusia, modal, dan sumber daya lainnya.

Pembangunan Desa merupakan kegiatan dalam pembangunan dimana terintegrasi usaha-usaha pemerintah desa dan masyarakat desa dengan maksud dan tujuan meningkatkan tahap hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan nasional. Dalam pembangunan desa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya seperti Pembangunan Infrastruktur Desa, Membangun Sumber Daya Manusia, Membangun Ekonomi Desa melalui sektor Ekonomi Kerakyatan, Membangun Sektor Pemerintahan.

Pembangunan Desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional karena hal sebagai berikut:

- a. wilayah Indonesia sebagian besar terdiri atas daerah pedesaan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa. Karena ini pembangunan lebih berorientasi ke wilayah pedesaan;
- b. desa merupakan tempat sebagian penduduk yang bermata pencarian dibidang pertanian dan menghasilkan nahan makanan;
- c. desa merupakan satuan administrasi pemerintahan terkecil, yaitu administrasi pemerintahan desa;
- d. desa memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak untuk modal pembangunan, baik itu dalam sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan;

- e. desa memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak untuk melaksanakan pembangunan. Namun yang perlu diperhatikan adalah faktor kualitas sumber daya manusianya, sebab apalah artinya jumlah penduduk yang banyak jika tidak ditunjang dengan kualitas yang memadai, baik berhubungan dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, tingkat produktivitas dan kesehatan.

Dalam melakukan pembangunan harus terintegrasi dimana bertujuan agar pembangunan tersebut sampai dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan. Adanya adaptasi juga sangat penting, dimana seperti yang dijelaskan menurut Gerungan (1991:55) yang mengatakan bahwa Adaptasi adalah suatu penyesuaian terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi. Sedangkan Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dan pengembangan consensus dengan berbagai macam organisasi lainnya. (Nazrudin, dalam Claude 1994:53).

b) Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap pengembangan desa swadaya dan desa swakarya dengan memperhatikan keserasaian hubungan antara pedesaan dengan perkotaan, imbalanced kewajiban yang serasi antara pemerintah dan

masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antar berbagai program sektoral/regional/inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam jangka pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia

Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor-sektor yang menjadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, Keluarga Berencana (KB), Pendidikan dan kesehatan. (Tjahja Supriatna 2000:64)

Tujuan pembangunan pedesaan secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Jadi dapat dikatakan Pembangunan Desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta untuk mencapai kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik dan tentunya juga diikuti dengan peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Desa sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya.

Sasaran pembangunan pedesaan agar terciptanya:

1. peningkatan produksi dan produktivitas.
2. percepatan pertumbuhan desa.

3. peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan.
4. kerja dan lapangan usaha produktif.
5. peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
6. perkuatan kelembangaan.

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.

c) Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari Pembangunan Nasional. Oleh karena itu pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Adapun yang menjadi Prinsip-prinsip Pembangunan Desa (Tjahja Supriatna 2000:13) adalah:

1. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat
2. Dinamis dan berkelanjutan serta Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

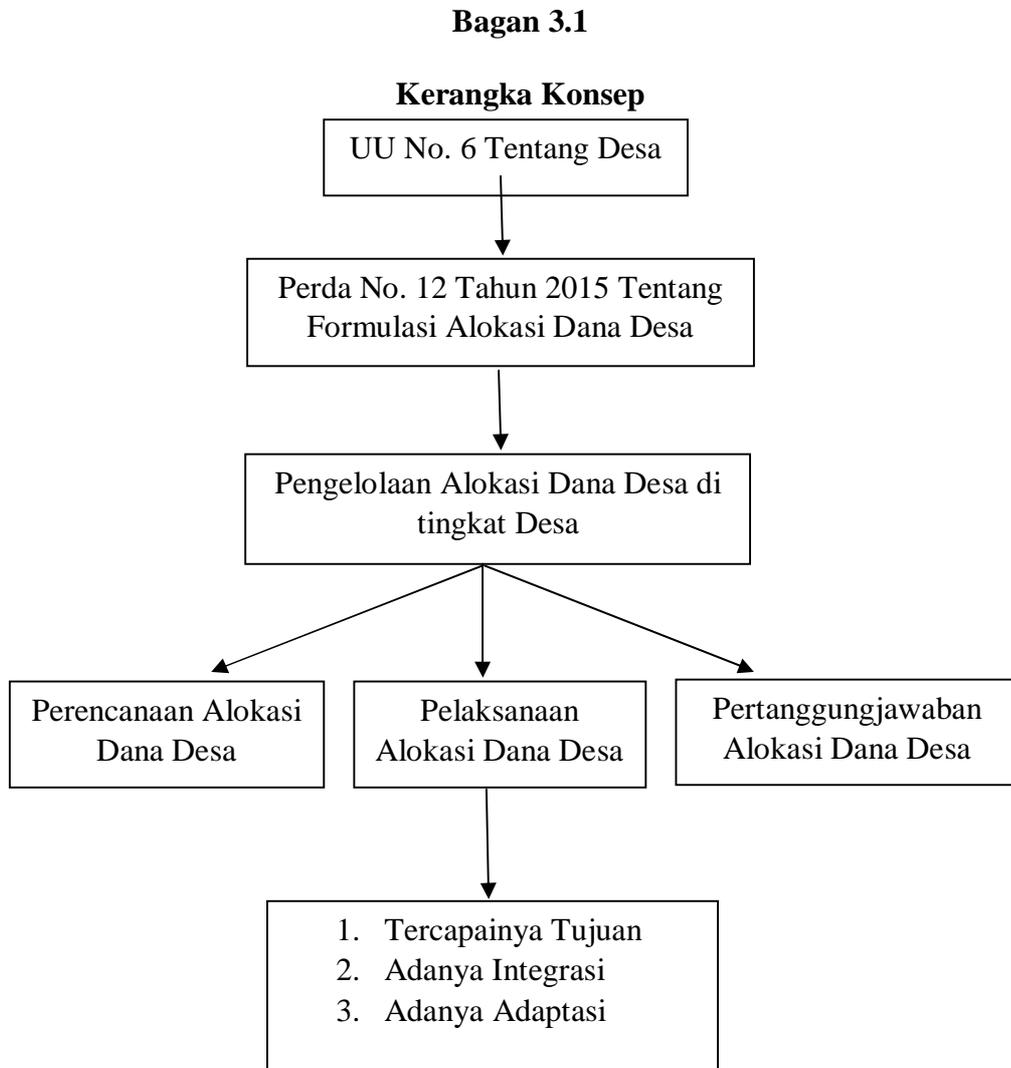
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Sugiyono (2011:11) mengatakan bahwa secara teoritis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan diri sendiri (peneliti) sebagai instrumen penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian akan mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data, dalam mencapai wawasan-wawasan imajinatif ke dalam dunia social informasi, dimana peneliti diharapkan fleksibel dan relatif tetapi tetap mampu mengatur jarak.

B. Kerangka Konsep

Sugiyono (2010:66) menyebutkan bahwa kerangka berfikir dalam surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran yang diteliti.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



C. Definisi Konsep

Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi dan hal-hal yang sejenisnya. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa

yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Untuk memperjelas dan menyederhanakan beberapa konsep dari uraian teroris di dalam sebuah penelitian maka peneliti menyederhanakan beberapa konsep. Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Akuntabilitas merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula didalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalamnya mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.
2. Konsep Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
3. Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh pemerintahan desa yang diprioritaskan untuk pembangunan desa itu sendiri dan juga untuk menjadi kebutuhan dari masyarakat desa.

4. Konsep Pembangunan adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengansumsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan.
5. Konsep Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus segala kepentingan masyarakat setempat berdasarkan dengan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasioanal dan berada di daerah Kabupaten.
6. Konsep Pembangunan Desa adalah pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di desa, yang berdasarkan dengan kebutuhan dari masyarakat desa itu sendiri.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam peneleitian ini antara lain yaitu:

- a) Tercapainya tujuan, yaitu tercapainya hasil dalam pelaksanaan program Pembangunan guna untuk meningkatkan Pembangunan di desa itu sendiri. Tecapainya tujuan program dapat dilihat dari: tercapainya tujuan program sesuai dengan target dan sasaran dalam

kegiatan pembangunan desa yang terletak di Desa Aras Kabupaten Batubara.

- b) Integrasi, yaitu aspek penyeragaman dan penyatuan dalam suatu sistem. Integrasi dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Agar kegiatan Program Pembangunan Desa dapat terintegrasi dengan masyarakat sebagai sasaran yang dapat dilakukan melalui: a) tata cara pelaksanaan Program Pembangunan Desa yang dilaksanakan tepat dengan waktu yang telah ditentukan. b) perlu adanya hubungan terhadap masyarakat agar kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat dan bisa dirasakan bagi oranglain maupun masyarakat setempat.
- c) Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk digunakan tolak ukur proses pengadaan pengisian tenaga kerja.

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan juga orang yang mampu atau mengetahui informasi. Teknik penentuan narasumber dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*, yaitu memilih sejumlah responden dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Dalam penelitian ini adapun data yang diperoleh dari narasumber adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam

upaya meningkatkan pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara sebagai berikut:

1. Kepala Desa (Muhammad Yusuf)
2. Kaur Umum/Keuangan (Muhammad Yunus)
3. Tim pelaksana (Fahmi)
4. Tokoh Agama (Sumini)
5. Tokoh Pemuda (Dedi Fahrizal Nasution. SE)

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik yang dilakukan melalui studi kepustakaan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:
 - a) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

- b) Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature seperti: buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data, kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara diuraikan secara deskriptif dan analisis kualitatif.

Analisis data menurut Moleong (2003:103), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam proses analisis terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir yaitu:

- 1.Reduksi data, merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pematapan penelusuran data.

H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna dan bermanfaat dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah di Desa Aras Kabupaten Batubara. Waktu dalam melakukan penelitian akan dilaksanakan pada bulan Januari 2018.

1. Visi dan Misi Desa Aras

a. Visi

Aparatur Desa Aras dan Masyarakat setempat sepakat bahwa Visi adalah gambaran umum dari kondisi yang ideal yang dibutuhkan oleh Desa Aras di masa yang akan datang yang dicapai bersama dengan partisipasi masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, yaitu 6 (enam) tahun. Jangka waktu dimaksud bagi Desa Aras adalah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

Adapun sesuai kesepakatan antara Pemerintah Desa Aras dengan BPD Aras bahwa visi Desa Aras adalah: “Membangun Desa Bersama Masyarakat Menuju Masyarakat Sejahtera”.

b. Misi

- a. Membangun dan memberdayakan sarana dan prasarana pendidikan dalam mewujudkan masyarakat yang berwawasan luas, sehingga dapat mengelola potensi laut yang ada menjadi sumber daya alam produktif, serta dapat berfikir memajukan ekonomi sesuai dengan potensi yang ada tersebut lewat perencanaan partisipatif dan semangat kebersamaan.

Misi ini menjelaskan Penciptaan Fondasi Manajemen Pemerintahan yang mantap melalui Pengembangan Data / Informasi Desa yang benar dan rinci Menuju Perencanaan Desa yang Detil dan Lengkap serta Berkualitas.

Misi ini disepakati karena terbukti kualitas manajemen pemerintahan tergantung dengan kualitas manajemen pembangunan. Aspek pemerintahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan sebaliknya aspek pembangunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemerintahan. Pembangunan adalah upaya pemerintah dan segenap masyarakat dalam melakukan perubahan keadaan dari keadaan sekarang menuju keadaan yang ideal dan lebih memenuhi hajat kehidupan orang banyak, dan lebih baik sesuai dengan perkembangan tingkat peradaban manusia.

Pemerintahan yang tidak melakukan amanat pembangunan merupakan organisasi yang lain. Sedangkan manajemen pembangunan menempatkan perencanaan sebagai tahapan profesional pemerintah yang

harus dipenuhi. Tanpa perencanaan yang baik suatu pemerintahan menunjukkan dirinya tidak profesional.

Perencanaan yang baik disusun berbasis data/informasi tolok ukur yang jelas dan riil. Data/informasi yang riil dimaksud adalah data profil desa. Informasi profil yang salah akan menyesatkan pikiran pengambilan keputusan dalam perencanaan kebijakan. Artinya data yang salah akan menghasilkan perencanaan yang salah. Perencanaan yang salah sama artinya merencanakan kesalahan.

Kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan merupakan indikator tata pemerintahan yang kurang baik. Oleh sebab itu diyakini “good village governance” tidak mungkin terwujud jika fondasi pembangunan yaitu pengelolaan data/informasi dan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan tidak akuntabel. (tidak bisa dipertanggungjawabkan).

- b. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa dengan mengalokasikan Pelaksanaan kegiatan ini melalui dana ADD dan DD, kemudian untuk pendanaan kegiatan lain melalui pendanaan APBD, disamping itu juga direncanakan pembangunan infrastruktur melalui dana CSR, yaitu PT. Majin dan PT. Inalum.
- c. Bidang Kesehatan dengan meningkatkan Pelayanan kepada Ibu-ibu dan anak-anak belita melalui posyandu.

- d. Meningkatkan Pelayanan dalam Bidang Pertanian dengan melaksanakan pengajuan kepada pemerintah untuk pengadaan pupuk subsidi kepada masyarakat.
- e. Mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih, melalui pelaksanaan otonomi desa. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

I. Bidang Infrastruktur/Sarana Prasarana

- a. Badan Jalan poros desa banyak yang rusak.
- b. Badan Jalan Dusun sering erosi pada musim hujan.
- c. Sarana penghubung antar desa tidak memadai.
- d. Rumah warga banjir pada musim hujan dan air pasang.
- e. Air menggenangi permukiman warga jika musim hujan.
- f. Saluran pembuangan air kurang optimal.
- g. Sarana air bersih kurang.
- h. Tapal Batas Desa Tidak ada.

II. Bidang Ekonomi

- a. Hasil laut kurang karena rusaknya terumbu karang.
- b. Produksi laut sangat murah.
- c. Belum ada badan usaha milik desa.
- d. Pedagang belum terorganisir dengan baik.
- e. Kurang modal usaha.
- f. Transportasi ke lahan lautan perikanan kurang memadai.

III. Bidang Sosial Budaya

- a. Kelompok nelayan sangat perlu pembinaan.
- b. Kelompok nelayan belum berperan maksimal.
- c. Anak-anak di usia remaja kurang kreatifitas.
- d. Petugas posyandu sering mengeluh masalah pendanaan.
- e. Masih banyak pengangguran.
- f. Banyak para remaja terkontaminasi narkoba.
- g. Pada musim penghujan sering muncul penyakit diare dan demam.
- h. Kesadaran pola hidup sehat masih kurang.

Arah Kebijakan Keuangan Desa

I. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Daerah.
- Pajak yaitu PBB dipungut oleh Colektor PBB bekerja sama dengan Kepala Dusun dalam hal ini kolektor turun secara bergiliran ke tiap dusun dengan pemberitahuan terlebih dahulu dan selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan pengutipan, Kepala Dusun melakukan pengutipan langsung kerumah wajib pajak dan menyetorkan hasilnya kepada kolektor setiap bulannya secara berkesinambungan.
- Pendapatan dan Pungutan Desa dan dari pemerintahan dikelola oleh bendahara Desa.

II. Arah Pengelolahan Belanja Desa

- a. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa.
- b. Honor Kepala Dusun dan staf desa lainnya.
- c. Pengadaan barang dan jasa.
- d. Pengadaan ATK, Inventaris Kantor Desa dll.
- e. Biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM dan PKK.
- f. Meliputi biaya rapat dan perjalanan Dinas.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana.
- h. Pembangunan Badan Milik Usaha Desa (BUMDesa).
- i. Bantuan Sosial

Semuanya diatur dalam APBDesa

2. Legenda dan Sejarah Desa Aras

Desa Aras awalnya merupakan bagian dari desa Sukaraja, Desa Sukaraja dimekkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu:

1. Desa Sukaraja
2. Aras

Kepala Desa Aras berasal dari Nama Penghulu, Desa Aras berada pada ketinggian ± 10 m diatas Permukaan Laut, Tanah di Desa Aras merupakan Tanah Cabuk (Percampuran antara tanah liat pasir dan debu) Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Aras cocok untuk lahan Pertanian Pangan Seperti: Padi, Palawja, dan Holtikultura. Apalagi keadaan tanah yang tergolong datar sehingga mudah untuk membuat jaringan irigasi sebagai sarana Penunjang Pola Pertanian Teknis.

3. Kondisi Umum Desa

1. Demografi

Desa Aras dengan luas wilayah 820 Ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.

Batas Wilayah Desa Aras :

- ° Sebelah Utara : Sungai Tanjung
- ° Sebelah Selatan : Desa Sukaraja
- ° Sebelah Timur : Sungai Dalu-Dalu
- ° Sebelah Barat : Desa Tanah Merah

- Topografi dengan bentang wilayah Datar.
- Curah Hujan : 2000/3000 mm
- Jumlah bulan hujan : 5 bulan
- Suhu rata-rata harian : 30 – 35 °C
- Tinggi tempat : 14 m dpl.
- Luas wilayah Desa Aras 820 Ha Terdiri dari:
 - ° Tanah Sawah Irigasi : 520 ha
 - ° Kebun kelapa sawit : 170 ha
 - ° permukiman : 110 ha
 - ° Kebun palawija : 1 ha
 - ° Tanah lainnya : 19 ha

2. Keadaan Sosial Budaya

1. Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa Aras, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.145 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.048 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.097 jiwa dan terdiri dari 1.016 Kepala keluarga (KK). Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Aras Tahun 2015

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1.	Laki-laki	2.048	48,35 %
2.	Perempuan	2.097	51,65 %
	Jumlah		100%

Sumber: Buku Administrasi Desa Aras Kecamatan Air Putih, Tahun 2014

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Aras dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klarifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Aras yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Aras berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Aras Tahun 2015

No.	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase (%)
1.	0-5	127	133	260	7.53
2.	6-10	159	188	347	10.4
3.	11-15	175	154	329	9.02
4.	16-20	151	156	307	7.09
5.	21-25	110	134	244	6.53
6.	26-30	129	133	262	6.6
7.	31-35	132	140	274	6.04
8.	36-40	123	131	254	5.72
9.	41-45	142	115	251	5.79
10.	46-50	137	133	270	5.85
11.	51-55	132	127	259	5.91
12.	56-60	119	120	239	5.97
13.	61-65	117	123	240	5.66
14.	66-70	109	118	227	5.35
15.	70-75	93	106	199	4.17
16.	≥76	87	96	183	2.36
	Jumlah	2048	2097	4145	100%

Sumber: Buku Administrasi Desa Aras Kecamatan Air Putih, Tahun 2015

Dari total jumlah penduduk Desa Aras, yang dapat dikategorisasikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yaitu penduduk yang berusia >76 tahun, merupakan jumlah yang paling sedikit 183, 2,63%. Dari usia yang paling banyak 6-10 tahun ada 347 orang, 10,41%, sedangkan 11-15 tahun ada 329 orang, 9,07%.

Dari usia ≥ 25 tahun tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 129 orang 3,28% dan perempuan ada 133 orang.

Penduduk usia produktif pada usia antara 20-60 tahun di Desa Aras jumlahnya cukup signifikan, yaitu 2053 jiwa atau 48,12% dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 1.030 orang, 24,04%, sedangkan perempuan 1.023 orang, 24,01%.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif lebih banyak dari jumlah laki-laki. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Aras dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

2. Mata Pencaharian Pokok

Secara umum mata pencarian warga Desa Aras dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan,

buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian dapat dilihat pada Tabel

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Aras jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 60%. Dari jumlah tersebut, kehidupan ^{bergantung} di sektor pertanian, ada 63% dari total jumlah penduduk.

Jumlah ini terdiri dari buruh nelayan terbanyak, dengan 40% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 43% dari total jumlah penduduk. Nelayan sebanyak 60% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 63% dari total jumlah penduduk.

Terbanyak ketiga adalah wiraswasta dengan 05,00% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 05,00% dari total jumlah penduduk. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI, POLRI, pedagang, karyawan swasta, sopir, wiraswasta, tukang bangunan, dan lain-lain.

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Aras Tahun 2015

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase dari Total JumlahPenduduk
1.	Petani	621	43,00
2.	Buruh Nelayan	5	20,00
3.	PNS	20	0,007

4.	Karyawan Swasta	76	0,008
5.	Pedagang	120	0,010
6.	Pensiunan	14	
7.	Ibu Rumah Tangga	500	18,67
8.	Penelayan	-	
9.	Lain-lain/tidak tetap	67	18,215
	Jumlah		100%

Sumber: Dari data survey potensi ekonomi Desa Aras

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Aras memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh nelayan dan penelayan. Setidaknya karena kondisi lahan kelautan perikanan mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan kelautan perikanan di Desa Aras secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran,

pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Aras.

• Tidak Tamat SD	: 115 orang
• SD	: 340 orang
• SLTP	: 417 orang
• SMA	: 662 orang
• Diploma	: 2 orang
• Sarjana	: 13 orang
• Pendidikan Keterampilan	: - orang
° Jumlah Sekolah TK	: 1 unit
° PAUD	: 1 unit
° Jumlah Sekolah SD/Sederajat	: 3 unit
° Jumlah Sekolah SLTP Negeri	: - unit
° Jumlah Sekolah MTS Al-wasliyah	: - unit

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Aras kebanyakan usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan SLTA 662 orang, 42% dan pendidikan menengah SLTP 417 orang, 28,74%. Tamat SD 340 orang, 11,26% sementara yang dapat menikmati pendidikan Perguruan Tinggi 15 orang, 3,63%. Dan terdapat 115 jiwa atau 15,34% tidak tamat SD.

4. Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Aras termasuk kategori masyarakat yang mendekai homogen. Hal ini dikarenakan Mayoritas masyarakat Desa Aras beraga Islam. Secara kultural, pegangan agama ini di dapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental di antara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan tuntutan dari orangtua ke anak dan ke cucu. Hal inilah yang membuat agama Islam mendominasi agama di Desa Aras.\

Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua, bahwa ini pola-pola hubungan antara masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti NU atau Muhammadiyah. Jumlah penduduk Desa Aras berdasarkan agama dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Aras Tahun 2015

No.	Agama	Jumlah	Presentase
1.	Islam	4.110	96,95%
2.	Katholik	15	2%
3.	Kristen	20	2,5%
4.	Hindu	-
5.	Budha	-	0,01
	Jumlah		100%

Sumber: Data Dinding Desa Aras Kabupaten Batubara

Tabel 3.5
Jumlah Tempat Ibadah Desa Aras Tahun 2015

No.	Agama	Jumlah	Presentase
1.	Masjid/Musholla	8	100 %
2.	Pura	-
3.	Gereja	1
4.	Wihara	-
5.		
	Jumlah		100%

Sumber: Data Dinding Desa Aras Kabupaten Batubara

Dalam Tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Aras yang beraga Islam mendominasi dengan jumlah 4.958 orang atau 95,95% dari total jumlah penduduk, pemeluk agama Kristen 87 orang, 4,05%. Islam sebagai agama yang paling banyak dipeluk warga, mendominasi di seluruh Dusun yang ada di Desa Aras.

5. Keadaan Ekonomi

- Pembayaran pajak

- Jumlah wajib pajak : 1.122 orang

- Target Penerimaan Pajak : Rp. 27.711.153

- Jumlah Anggaran Belanja dan Penerimaan Desa tahun ini yang merupakan Dana Perimbangan

- Sumber Penerimaan Desa lainnya

- Penerimaan Asli Desa (PAD)

- Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat

- Bantuan Gubernur

6. Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa terkendali dengan baik dan nyaman serta sangat berarti bagi masyarakat.

a. Pembagian Wilayah Desa

Dengan Luas Wilayah 820 ha Desa Aras yang terdiri dari 9 (sembilan) Dusun.

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa.

- Kepala Desa : 1 orang

- Perangkat Desa

- Sekretaris Desa : 1 orang

- Kaur Pemerintahan : 1 orang

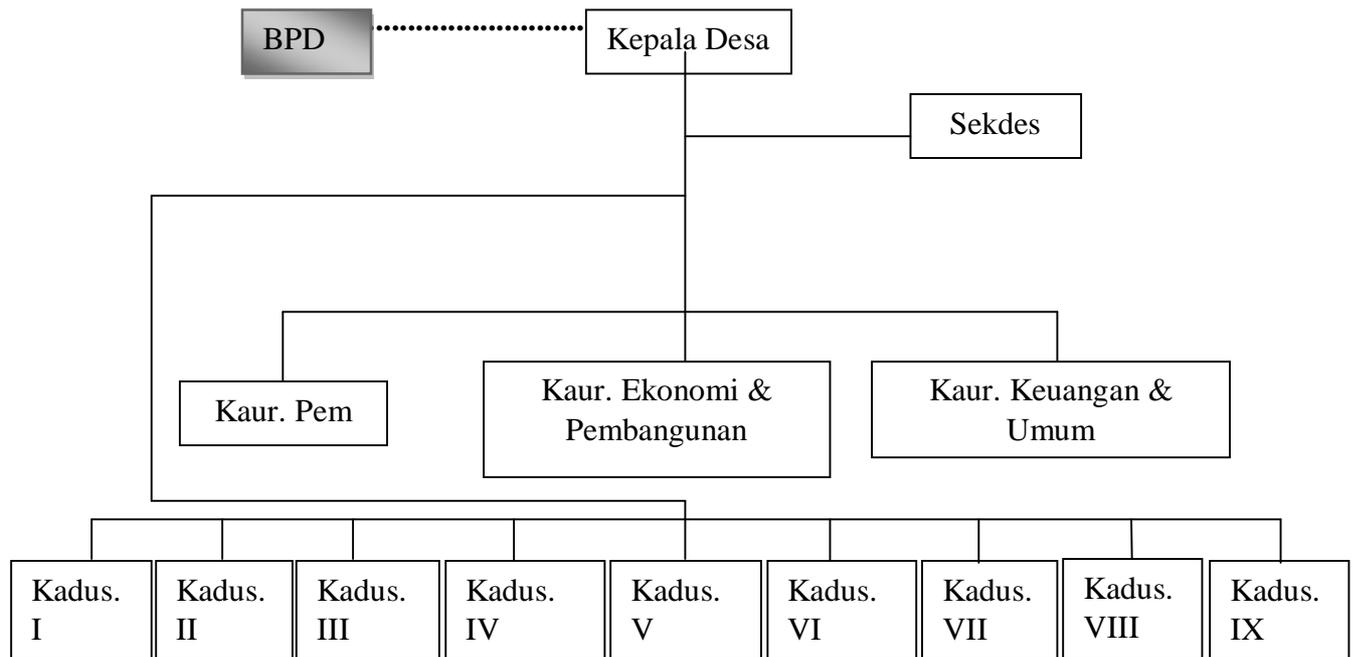
- Kaur Keuangan dan Umum : 1 orang

- Kaur Ekonomi dan Pembangunan : 1 orang

Bagan 3.2

Struktur Organisasi

Pemerintah Desa Aras Kabupaten Batubara



Sumber: Data Dinding Desa Aras Kabupaten Batubara

Tabel 3.6

Daftar Nama Aparat Pemerintahan Desa Aras Tahun 2015

No.	Nama	Jabatan
1.	M. Yusuf	Kepala Desa
2.	Ika Suryani Cahya	Sekretaris Desa
3.	Dedi Dolok Saribu, S.E	Kepala Urusan Pemerintahan
4.	Halimah	Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan

5.	Muhammad Yunus	Kepala Urusan Keuangan dan Umum
6.	Selamat	Kepala Dusun I
7.	Jumrik	Kepala Dusun II
8.	Izhar	Kepala Dusun III
9.	Jumarik	Kepala Dusun IV
10.	Jumali	Kepala Dusun V
11.	Irawan	Kepala Dusun VI
12.	Sukarlan	Kepala Dusun VII
13.	Surip	Kepala Dusun VIII
14.	Ramidin Sihotang	Kepala Dusun IX

Sumber: Buku Administrasi Desa Aras Kabupaten Batubara Tahun 2015

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut adalah uraian dari struktur organisasi Pemerintahan Desa Aras Kabupaten Batubara:

- a) Tugas Pemerintahan Desa
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 2) Mengajukan rencana peraturan desa
 - 3) Menetapkan peraturan desa
 - 4) Mengajukan rencana APBDes
 - 5) Membina kehidupan masyarakat desa
 - 6) Membina perekonomian desa

7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

b) Tugas dari Kepala Desa:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan
- 2) Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Selain dari tugas, Kepala Desa juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

Wewenang dari Kepala Desa

- 1) Memimpin penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes yang akan dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 4) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dari Kepala Desa:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memelihara ketertiban serta ketentraman masyarakat
- 4) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh anggota pemerintahan desa

- 5) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- 6) Mendamaikan perselisihan antara masyarakat desa
- 7) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa
- 8) Membina dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat
- 9) Mengembangkan potensi dan sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup
- 10) Membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati
- 11) Memberi laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.

Adapun tugas pokok dan fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut:

c) Tugas Sekretaris Desa

- 1) Merumuskan serta mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 2) Pelaksanaan administrasi umum
- 3) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
- 4) Menyusun dan mengkoordinasikan mengenai program kerja
- 5) Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
- 6) Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
- 7) Menyusun program tahunan desa (RPJMDes-RKPDDes)
- 8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa jika Kepala Desa Berhalangan.

d) Tugas Kaur Pemerintahan

- 1) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa
- 2) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- 3) Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- 4) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi pemerintahan daerah/desa
- 5) Mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa
- 6) Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
- 7) Merumuskan upaya terciptanya ketentraman serta keterbiban dan pembangunan kesatuan bangsa desa.

e) Tugas Kaur Perekonomian/ Kesra

- 1) Mengolah, merumuskan, dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum
- 2) Melaksanakan urusan rumah tangga desa
- 3) Mengelola dan mengembangkan hasil pendapatan masyarakat desa
- 4) Mengatur perekonomian pendapatan desa
- 5) Menyusun dan mengumpulkan laporan Pemerintahan Desa
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

f) Tugas Kaur Umum/Keuangan

- 1) Mengumpulkan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
- 2) Menyusun program kerja, pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- 3) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 5) Mengumpulkan bahan penyusunan dan perencanaan program kerja
- 6) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan mengevaluasi penyusunan laporan, pelaksanaan, program dan pelaksanaan.

g) Tugas Kepala Dusun

- 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerja
- 2) Membantu Kepala Desa dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan dan kerukunan di wilayah kerjanya
- 3) Melaksanakan keputusan dari kebijaksanaan Kepala Desa di wilayah kerjanya
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

Tabel 3.7

Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aras 2015

No.	Nama	Jabatan
1.	Ruslan Bakri	Ketua
2.	Sarimaulidin, Spdi	Wakil Ketua
3.	Takdir Akbar	Sekretaris
4.	Wardi Maji	Anggota
5.	Fadli	Anggota
6.	Arifin	Anggota
7.	Abdul Jamil	Anggota
8.	Amin	Anggota
9.	Muhammad Syafii	Anggota
10.	Suwandi	Anggota
11	Sumamin	Anggota

Sumber: Buku Administrasi Desa Aras

c. Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil perencanaan pembangunan di desa antara lain:

- a. Pemerintahan Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, antara lain:
 - LMPD (Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa)
- d. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
- e. Lembaga Kemasyarakatan lain:
 - PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)
 - Karang Taruna
 - Kelompok Nelayan
- f. SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kab. Batubara yang berkaitan langsung dengan program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
- g. Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) yang menggulirkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pola Pendampingan/Fasilitasi, yang melahirkan Lembaga-lembaga antara lain:
 - TPK (Tim Pengelola Kegiatan)

- Kelompok SPP
- Tim Pemelihara Perdesaan (TP3)
- KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Tercapainya Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Muhammad Yusuf selaku Kepala Desa di Desa Aras Kabupaten Batubara pada tanggal 26 Januari 2018 mengatakan bahwa tujuan pengalokasian dana desa untuk lebih memudahkan masyarakat yaitu dengan dilaksanakannya program pembangunan yang ada di desa agar kehidupan masyarakat desa menjadi sejahtera. Namun program pembangunan tersebut belum sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Banyaknya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan anggaran dana desa yang ada, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Muhammad Yunus selaku Kaur Umum/Keuangan di Desa Aras Kabupaten Batubara pada saat wawancara tanggal 26 Januari 2018, mengatakan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan banyaknya rencana yang akan dibangun tetapi tidak sesuai dengan anggaran dana desa yang ada, pembangunan yang ada di Desa

Aras juga belum sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga tujuan utama dari dilaksanakannya pembangunan yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat belum tercapai dengan maksimal.

Kemudian disampaikan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fahmi selaku Tim Pelaksana pada tanggal 26 Januari 2018, mengatakan bahwa pembangunan yang ada di desa aras sudah dilaksanakan meskipun tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Pembangunan tersebut juga belum mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan tidak sesuainya perencanaan pembangunan dengan anggaran dana desa yang tersedia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sumini selaku Tokoh Agama di Desa Aras Kabupaten Batubara saat diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2018 yang mengatakan bahwa tujuan utama dari dilaksanakannya pembangunan yang ada di desa Aras yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, mengurangi angka kemiskinan serta memudahkan masyarakat desa. tetapi dilihat dari pembangunan yang telah berjalan masih belum tercapai dan masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Masih banyak pembangunan yang belum terlaksana, hal ini disebabkan oleh banyaknya rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan anggaran dana desa yang tersedia.

Kemudian diperkuat lagi dari hasil wawancara oleh Bapak Dedi Fahrizal Nasution, SE selaku Tokoh Pemuda masyarakat pada saat wawancara tanggal 26 Januari 2018, yang mengatakan bahwa

pertanggungjawaban dari kepala desa belum terlihat dengan jelas karena masih ada pembangunan yang belum tercapai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga tidak sampai kepada masyarakat bahwa tujuan utama dari dilaksanakannya pembangunan untuk memudahkan masyarakat dan membuat masyarakat menjadi sejahtera lagi.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber dapat diketahui bahwa tujuan dari Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara belum berjalan dengan baik. Tujuan utama dari dilaksanakannya pembangunan sendiri adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan memudahkan masyarakat dengan adanya pembangunan yang di desa, tetapi dapat dilihat bahwa pembangunan yang ada di Desa Aras sendiri masih belum terlaksana dan berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan banyaknya perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Pertanggungjawaban dari pemerintah desa juga tidak terlihat jelas mengenai program pembangunan yang belum terlaksana, sehingga masyarakat desa terlihat sangat kecewa dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Adapun daftar kegiatan program pembangunan yang sudah terlaksana dan program pembangunan yang belum terlaksana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Kegiatan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Dan Dana Desa (DD)
Desa Aras Kabupaten Batubara Tahun 2017**

ADD = 467.000.000 + APBDES = 90.000.000 = 557.000.000

DD = 795.382.338

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 309,130,436	
	• Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 219,600,000	ADD
	• Operasional Perkantoran	Rp. 89,530,436	ADD
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 871,002,000	
	• Pembangunan Jalan rabat beton Dusun II ke Dusun IV Sepanjang ±100 m	Rp. 46,965,000	ADD/PAPBDES
	• Pembangunan Jalan rabat beton Dusun III ke Dusun VI	Rp. 326,795,000	DD

	Sepanjang ±468 m		
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan rabat beton Dusun V Sepanjang ±110 m 	Rp. 48,898,000	DD
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan rabat beton Dusun VII Sepanjang ±215 m 	Rp. 74,373,000	DD
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jogging Track Dusun IV Sepanjang ±185 m 	Rp. 80,205,000	DD
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Siskamling Dusun II 	Rp. 11,285,000	ADD
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Siskamling Dusun V 	Rp. 11,285,000	ADD
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Posyandu Dusun II 	Rp. 38,507,000	DD
	<ul style="list-style-type: none"> Mobilier Posyandu (Tempat Tidur, Meja, Kursi) 	Rp. 3,180,000	DD
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Lening Saluran Drainase dan Pembuatan Plat Deuker Dusun V Sepanjang ±60 m 	Rp. 43,035,000	ADD/PAPBDES
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Lening Saluran 	Rp. 93,115,000	DD

	Drainase Dusun VII Sepanjang ± 225 m		
	• Pembangunan Lening Saluran Drainase Dusun V Sepanjang ±98 m	Rp. 41,359,000	DD
	• Pengeboran Sumur Bor Dusun VII	Rp. 10,000,000	ADD
	• Pembangunan Rehap Gapura Tanda Batas Desa Dusun II	Rp. 10,000,000	ADD
	• Pemasangan Lampu Jalan Dusun VI	Rp. 12,000,000	ADD
	• Pembuatan teratak (2buah)	Rp. 20,000,000	ADD
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 43,680,000	
	• Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 14,680,000	ADD
	• PKK	Rp. 10,000,000	ADD
	• Bantuan Peringatan HUT RI	Rp. 10,000,000	ADD
	• Bantuan Peringatan Hari Besar Islam (Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi)	Rp. 4,000,000	ADD

	• LPM	Rp. 5,000,000	ADD
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 80,130,338	
	• Bimtek Kepala Desa	Rp.15,000,000	ADD
	• Bimtek Sekretaris Desa	Rp. 10,500,000	ADD
	• Bimtek Bendahara Desa	Rp. 10,500,000	ADD
	• Pelatihan Operator	Rp. 2,000,000	ADD
	• Siskeudes	Rp. 5,000,000	DD
	• Bimtek LPM	Rp. 11,130,000	DD
	• Pelatihan Pengurus BUMDES (3orang)	Rp. 13,500,000	DD
	• Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan SID	Rp. 12,500,000	DD
	Penyataan Modal Desa Pembentuk BUMDES	Rp. 50,000,000	DD

**Tabel 4.2 Rekap Kegiatan Desa Aras
Kabupaten Batubara**

No	Kegiatan	Lokasi	Vol	Satuan	Total Fisik	Ops TPK	Jumlah Total
1	Rabat Beton	Dusun III-VI	468	M	320,388,000	6,407,000	326,795,000
2	Jogging Track	Dusun IV	185	M	78,633,000	1,572,000	80,205,000
3	Drainase/Lening	Dusun V	98	M	40,549,000	810,000	41,359,000
4	Rabat Beton	Dusun V	110	M	47,940,000	958,000	48,898,000
5	Rabat Beton	Dusun VII	215	M	72,915,000	1,458,000	74,373,000
6	Drainase/Lening	Dusun VII	225	M	91,290,000	1,825,000	93,115,000
7	Posyandu	Dusun II	1	Unit	37,752,000	755,000	38,507,000
8	Pelatihan BUMDes	Desa	1	Kegiatan	13,500,000		13,500,000
9	SID	Desa	1	Kegiatan	12,500,000		12,500,000
10	LPM	Desa	1	Kegiatan	11,130,338		11,130,338
11	SikeuDes	Desa	1	Kegiatan	5,000,000		5,000,000
12	Modal BUMDes	Desa	1	Ls	50,000,000		50,000,000
Total							795,382,338
Alokasi Dana Desa (ADD)							795,382,338
Selisih							-

**Tabel 4.3 Anggaran Dana Desa (DD)
Tahun 2017**

Nama Kegiatan : Pembangunan Rabat Beton	
Lokasi	: Dusun III – Dusun VI
Volume	: ± 468 M
Total Fisik	: Rp. 320.388.000
Ops Tpk	: Rp. 6.407.000
Jumlah Total	: Rp. 326.795.000
Nama Kegiatan : Pembangunan Joging Track	
Lokasi	: Dusun IV
Volume	: ± 185 M
Total Fisik	: Rp. 78.633.000
Ops Tpk	: Rp. 1.572.000
Jumlah Total	: Rp. 80.205.000
Nama Kegiatan : Pembangunan Drainase/Lening	
Lokasi	: Dusun IV
Volume	: ± 98 M
Total Fisik	: Rp. 40.549.000
Ops Tpk	: Rp. 810.000
Jumlah Total	: Rp. 41.395.000
Nama Kegiatan : Pembangunan Rabat Beton	
Lokasi	: Dusun V
Volume	: ± 110 M
Total Fisik	:Rp. 47.940.000

Ops Tpk	: Rp. 958.000
Jumlah Total	: Rp. 48.898.000
Nama Kegiatan : Pembangunan Rabat Beton	
Lokasi	: Dusun VII
Volume	: ± 215 M
Total Fisik	: Rp. 72.915.000
Ops Tpk	: Rp. 1.458.000
Jumlah Total	: 74.373.000
Nama Kegiatan : Pembangunan Drainase/Lening	
Lokasi	: Dusun VII
Volume	: ± 225 M
Total Fisik	: Rp. 91.290.000
Ops Tpk	: Rp. 1.825.000
Jumlah Total	: Rp. 93.115.000
Nama Kegiatan : Pembangunan Posyandu	
Lokasi	: Dusun II
Volume	: 1 Unit
Total Fisik	: Rp. 37.752.000
Ops Tpk	: Rp. 755.000
Jumlah Total	: Rp. 38.507.000

**Tabel 4.4 Data Pembangunan
Yang belum Terlaksana**

No	Pembangunan
1.	Posyandu di Dusun I dan III
2.	Perbaikan jalan di Dusun II, IV, V
3.	Pembangunan Joging Track di Dusun III dan V
4.	Posyandu di Dusun VII

Sumber: Papan Informasi di Kantor Kepala Desa

b. Adanya Integrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2018 dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Kepala Desa di Desa Aras Kabupaten Batubara, mengatakan bahwa sebelum dilaksanakannya pembangunan, pemerintah desa terlebih dahulu mengumpulkan masyarakat dan mengadakan musyawarah desa guna untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat agar dalam proses pembangunan berjalan dengan baik. hanya sedikit masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah desa tersebut. Dalam pembangunan yang telah dilaksanakan, masyarakat juga ada yang berkomentar negatif karena pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan pembangunan yang belum terlaksana di beberapa dusun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus selaku Kaur Umum/Keuangan yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2018, mengatakan bahwa adanya bentuk kerjasama antara pemerintah desa

dengan masyarakat desa membuat pembangunan menjadi lebih baik. Namun hanya sedikit dari masyarakat desa yang ikut serta dalam pembangunan tersebut. Kurangnya integrasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat juga menyebabkan pembangunan tersebut tidak berhasil dan tidak berjalan dengan baik.

Kemudian hasil wawancara tanggal 26 Januari 2018 dengan bapak Fahmi selaku Tim Pelaksana, mengatakan bahwa kurangnya integrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat sangat mempengaruhi dari keberhasilan pembangunan tersebut. Banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan dan pembangunan apa saja yang sudah dilaksanakan hal ini disebabkan karena kurangnya integrasi yang dilakukan pemerintah desa.

Selanjutnya juga disampaikan oleh Ibu Sumini selaku Tokoh Agama pada saat wawancara tanggal 26 Januari 2018, yang mengatakan bahwa meskipun segala kegiatan sudah di informasikan melalui papan informasi yang ada di kantor kepala desa namun masih saja dari masyarakat yang tidak mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. jika dari pemerintah desa hanya memberikan informasi lengkap di papan informasi tetapi tidak adanya integrasi dari pemerintah desa tidak membuat masyarakat puas dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Dedi Fahrizal Nasution, SE selaku Tokoh Pemuda Masyarakat pada saat wawancara tanggal 26 Januari 2018,

mengatakan bahwa pemerintah desa selalu mengadakan musyawarah desa mengenai pembangunan yang ada di desa. tetapi kurangnya integrasi antara pemerintah desa dengan masyarakat sangat mempengaruhi program yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan.

Dari hasil semua wawancara dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan kurangnya integrasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat yang membuat masyarakat desa tidak mengetahui segala kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan. Meskipun sudah dilaksanakannya musyawarah desa tidak menjamin bahwa masyarakat desa mengetahui segala aktivitas desa karena hanya sedikit dari masyarakat yang ikut dalam kegiatan tersebut.

c. Adanya Adaptasi

Dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf selaku Kepala Desa pada saat wawancara tanggal 26 Januari 2018, mengatakan bahwa sebelum dilaksanakannya pembangunan, pemerintah desa mengadakan musyawarah desa guna untuk penyesuaian diri terhadap masyarakat. dalam program pembangunan yang ada di Desa Aras pemerintah desa menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat agar bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan bisa bekerja di pembangunan yang akan dilaksanakan di desa tersebut.

Penyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Muhammad Yunus selaku Kaur Umum/Keuangan pada saat wawancara tanggal 26 Januari 2018,

yang mengatakan bahwa adanya proses adaptasi terhadap masyarakat membuat pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Namun beberapa dari pemerintah desa dan beberapa dari masyarakat tidak menerapkan itu sehingga pembangunan yang terjadi tidak berjalan dengan sesuai prosedur. Meskipun demikian, masyarakat yang mengikuti musyawarah desa hanya sedikit namun masyarakat sangat aktif memberikan ide-ide serta masukan dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Fahmi selaku Tim Pelaksana pada saat wawancara tanggal 26 Januari 2018, yang mengatakan banyak dari masyarakat yang mengkritik mengenai pembangunan yang dilaksanakan di Desa Aras, banyaknya penyimpangan yang terjadi mengenai pembangunan tersebut yang menyebabkan masyarakat tidak terima karena sebelumnya sudah di janjikan bahwa di setiap dusun-dusun yang ada di desa tersebut akan dilaksanakan pembangunan. hal ini juga disebabkan karena kurangnya adaptasi diantara pemerintah desa dan masyarakat.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Ibu Sumini selaku Tokoh Agama pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2018, mengatakan bahwa kurangnya adaptasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat membuat masyarakat kecewa dengan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Meskipun dalam pembangunannya pemerintah desa bekerjasama dengan masyarakat dengan

menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat, hanya dari beberapa masyarakat saja yang ikut serta dalam pembangunan tersebut. Pemerintah desa juga sering mendengarkan komentar negatif dari masyarakat terkait dengan program pembangunan dan juga tentang kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Fahrizal Nasution, SE selaku Tokoh Pemuda Masyarakat yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2018, mengatakan bahwa walaupun adanya keterbukaan, masyarakat belum puas dengan hasil kerja pemerintah desa. Hal ini disebabkan dengan adanya bentuk penyimpangan dan adanya ketidaksesuaian dengan apa yang sudah direncanakan membuat masyarakat banyak berkomentar negatif. Pembangunan di Desa Aras Sendiri menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat tanpa menggunakan tenaga kerja dari masyarakat luar. Sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap bisa ikut bekerja dalam program pembangunan tersebut.

Dari semua hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pentingnya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman baik itu mengenai anggaran dana desa maupun pembangunan yang dilaksanakan. Adanya keterbukaan tidak menjamin bahwa masyarakat bisa percaya dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah desa. Hal ini disebabkan kurangnya pertanggungjawaban dari pemerintah desa mengenai pembangunan apa yang sudah direncanakan

sebelumnya dengan apa yang sudah dikerjakan. Adanya bentuk penyimpangan pembangunan juga membuat masyarakat desa tidak puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah desa. sebelum dilaksanakannya pembangunan seharusnya pemerintah desa terlebih dahulu melakukan proses adaptasi terhadap masyarakat yang mengikuti program pembangunan tersebut agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal.

B. Pembahasan

1. Tercapainya Tujuan

Menurut Mardiasmo (2006:3) tercapainya tujuan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan asumsi teori tersebut maka penulis menilai bahwa tujuan dari pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara belum akuntabel, hal ini dikarenakan banyaknya program pembangunan yang terencana namun tidak sesuai dengan anggaran dana desa yang ada. Adapun tujuan utama dari program pembangunan tersebut yaitu untuk mempermudah masyarakat, mensejahterakan kehidupan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi, belum sampai kepada masyarakat mengenai program pembangunan tersebut. Tidak adanya pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa terkait dengan pembangunan yang belum

terlaksana juga membuat masyarakat kecewa dengan pemerintah desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa belum tercapainya tujuan dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Hal ini dapat diindikasikan dalam wawancara yang dilakukakan dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku kepala desa pada tanggal 26 Januari 2018 yang menyatakan bahwa program pembangunan yang ada di desa aras belum mencapai pada tujuan utamanya yaitu mempermudah masyarakat dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Belum tercapainya tujuan tersebut disebabkan oleh banyaknya rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan anggaran dana desa yang ada.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tabel 4.5 seperti dibawah ini:

**Tabel 4.5 Data Pembangunan
Yang belum Terlaksana**

No	Pembangunan
1.	Posyandu di Dusun I dan III
2.	Perbaikan jalan di Dusun II, IV, V
3.	Pembangunan Joging Track di Dusun III dan V
4.	Posyandu di Dusun VII

Sumber: Papan Informasi di Kantor Kepala Desa

2. Adanya Integrasi

Menurut Nazrudin, dalam Claude (1994:53) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi,

komunikasi dan pengembangan consensus dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi merupakan aspek penyeragaman maupun penyatuan dalam suatu sistem. Dalam hal ini integrasi adalah kemampuan pemerintah untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat agar kegiatan yang dari segala program yang ada di Desa dapat terintegrasi sesuai dengan tujuan sarannya.

Berdasarkan asumsi teori tersebut maka penulis menilai bahwa kurangnya integrasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak berjalan dengan lancar. Meskipun sudah diadakannya musyawarah desa sebelum melaksanakan pembangunan, namun hanya beberapa dari masyarakat yang ikut dalam musyawarah tersebut. Pemerintah desa juga selalu memberikan informasi mengenai kegiatan yang ada di desa melalui papan informasi, namun jika tidak adanya integrasi antara pemerintah desa dengan masyarakat tidak akan menjamin masyarakat puas dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan pemerintah.

Hal ini dapat diindikasikan dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fahmi selaku Tim Pelaksana pada tanggal 26 Januari 2018 yang mengatakan bahwa kurangnya integrasi antara pemerintah desa dengan masyarakat mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan tersebut. Banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan karena tidak adanya integrasi yang mendalam antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui pemerintah desa telah melaksanakan program pembangunan yang ada di desa tersebut. Namun masih perlu diperkuat lagi integrasi antara pemerintah desa dengan masyarakat guna untuk menghindari hal-hal negatif serta komentar negatif dari masyarakat.

3. Adanya Adaptasi

Menurut Gerungan (1991:55) Adaptasi adalah suatu penyesuaian terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa adanya adaptasi yang dilakukan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dapat dikatakan masih kurang. dalam pelaksanaan pembangunan sendiri pemerintah desa menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, bisa ikut serta dalam pelaksanaan program tersebut. Sebelum dilaksanakannya program pembangunan tersebut pemerintah desa selalu mengadakan musyawarah desa guna untuk saling memberi informasi terkait pembangunan yang akan terlaksana maupun yang sudah terlaksana. Meskipun sudah diadakannya musyawarah desa, namun tetap saja masih kurang adaptasi yang ditunjukkan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Oleh sebab itu, pentingnya adaptasi antara pemerintah desa dengan

masyarakat yang merupakan salah satu keberhasilan dalam menjalankan program tersebut.

Hal ini dapat diindikasikan dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sumini selaku Tokoh Agama pada tanggal 26 Januari 2018 yang mengatakan bahwa kurangnya adaptasi yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat membuat masyarakat kecewa dengan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Meskipun dalam pembangunannya pemerintah desa bekerjasama dengan masyarakat dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat, namun hanya beberapa masyarakat saja yang ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Dengan demikian dapat diketahui pembangunan yang ada di Desa Aras Kabupaten batubara sudah dilaksanakan. Namun terjadi lemahnya adaptasi antara pemerintah desa dengan masyarakat sebelum melaksanakan pembangunan tersebut sehingga banyak dari masyarakat yang berkomentar negatif mengenai pembangunan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara belum maksimal hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya program pembangunan yang direncanakan tetapi tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Akuntabilitas dari pemerintah desa juga tidak terlihat jelas, tidak adanya pertanggungjawaban terhadap pembangunan yang belum terlaksana membuat masyarakat kecewa. Meskipun

segala kegiatan sudah diletakkan di papan informasi, namun masyarakat tidak mengetahui hal tersebut.

Adapun program pembangunan yang belum terlaksana dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4.6 Data Pembangunan
Yang belum Terlaksana**

No	Pembangunan
1.	Posyandu di Dusun I dan III
2.	Perbaikan jalan di Dusun II, IV, V
3.	Pembangunan Joging Track di Dusun III dan V
4.	Posyandu di Dusun VII

Sumber: Papan Informasi di Kantor Kepala Desa

Adanya penyimpangan dalam program pembangunan juga membuat masyarakat desa kecewa dengan hasil yang sudah dikerjakan oleh pemerintah desa. masyarakat sudah berharap agar disetiap dusun-dusun yang ada di desa tersebut akan dilaksanakan pembangunan sehingga tercapailah tujuan utama dari pembangunan tersebut yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi malah sebaliknya seperti tidak dilaksanakannya pembangunan di desa tersebut karena tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya, terlebih mengenai infrastruktur jalan yang sangat rusak . kurangnya integrasi dan adaptasi juga sangat mempengaruhi pembangunan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan. Banyak dari masyarakat yang tidak tahu mengenai pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan

maupun yang sudah terlaksana. tidak itu saja, banyak dari masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah desa hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. dari ± 4.145 jiwa yang ada di desa tersebut hanya 30% persen yang mengikuti musyawarah desa dan pembangunan tersebut. Dengan begitu terlihat jelas bahwa kurangnya sosialisasi maupun integrasi dan adaptasi yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang berada di Desa Aras Kabupaten Batubara belum berjalan dengan baik. Kurangnya akuntabel yang dilakukan oleh pemerintah desa menyebabkan tidak berjalan dengan lancar dari suatu program yang sudah direncanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari : a) tidak tercapainya tujuan dari program pembangunan itu sendiri diantaranya adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, serta mengurangi angka kemiskinan; b) kurangnya integrasi antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui program apa saja yang akan dilaksanakan di desa; c) kurangnya adaptasi dalam program pembangunan di desa tersebut.

Hal itulah yang menyebabkan tidak berhasilnya suatu program yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga banyak keluhan yang dikemukakan oleh masyarakat desa tersebut. Dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak berjalan dengan baik sehingga banyak dari masyarakat yang merasa kecewa, terlebih mengenai program yang belum terlaksana diantaranya seperti: pembangunan posyandu yang berada di Dusun I dan III; perbaikan jalan di Dusun II, IV, V; pembangunan jogging track di Dusun III,V; dan pembangunan posyandu di Dusun VII. Dengan demikian dapat disimpulkan dari saran narasumber bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang berada di desa aras lebih ditingkatkan lagi. Sehingga desa tersebut dapat menjadi desa yang lebih maju dan

tercapailah apa yang menjadi tujuan dari program pembangunan yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil temuan diatas, maka yang menjadi saran dalam penelitian adalah:

1. Sebaiknya pemerintah desa lebih meningkatkan lagi hubungan baik serta kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga yang terkait dan masyarakat desa, sehingga untuk ke depannya dapat mencapai hasil yang lebih maksimal lagi.
2. Sebaiknya partisipasi masyarakat desa lebih ditingkatkan lagi demi hasil yang lebih baik sehingga pembangunan yang dilaksanakan di desa tersebut sesuai dengan target yang telah direncanakan.
3. Sebaiknya pemerintah desa lebih meningkatkan lagi atas pertanggungjawaban terhadap program yang sudah terencana, terlebih dengan program yang belum terlaksana. Agar masyarakat tidak ada yang berkomentar negatif terkait pembangunan yang tidak terlaksana.

Daftar Pustaka

- Claude, Nazrudin. 1994. *Integritas Ketahanan Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Damsar, Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Kencana
- DIPL, Gerungan. 1991. *Psikologi Sosial*. PT. Eresco. Bandung
- Ellwood. 2003. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*. Biman Aksara: Jakarta
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. PT. Salemba Empat: Jakarta
- Kumorotomo. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transisi, Pustaka Pelajar*. Yogyakarta
- Marbun, B N. 1998. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Daerah*, Jakarta; Erlangga
- mardiasno. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*
- Miriam Budiarjo. 1998. *Menanggapi Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Mizan

- Moeheriono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Rajawali
Pers: Jakarta
- Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Mitra
Wacana Media: Jakarta
- Nugroho, D, Riant, 2004. *Reinventing Pembangunan*. PT. Alek Media
Komputindo
- Nurcholis, Hanif Dkk. 2009. *Perencanaan Partisiaptif Pembangunan
Daerah*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Saleh, Sirajaruddin H. Dan Aslam Iqbal. 1995. *Accountability the Endless
Prophecy*. Asian and Pacific Development Centre.
- Siagian, S. P, 1994. *Administrasi Pembangunan*, Cetakan 1 gunung Agung
, Jakarta
- Sugiyono. 2000. *Analisa Kualitatif Lokakarya Metodologi Penelitian Tesis
Program Pascasarjana*. Malang: Universitas Merdeka Malang
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* . Bandung: CV.
Alfabeta
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Kedua*.
Banda Aceh-Indonesia
- Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi. LPES*, Jakarta.

Supriatna, Tjahja. 2000. *Birokrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan*. Humaniora: Bandung

Syahdan, Gorris Dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD)*. Bandung

Wasistiono, S. 2007. *Desentralisasi, demokratisasi dan pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Press

_____. 2007. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung. Fokusmedia

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance-Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Pemda)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kewenangan Otonomi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
- Perda No 12 Tahun 2015 Tentang Formulasi Alokasi Dana Desa
- PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Monica Chindy Widya
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Gading, 12 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bukit Barisan I Gg. Kerinci No 19b

B. Pendidikan

1. 2002-2008 : SD Negeri 016397 Tanjung Gading
2. 2008-2011 : SMP Negeri 1 Sei Suka
3. 2011-2014 : SMA Negeri 1 Air Putih

C. Orangtua

Ayah : Sudani Jasmadi
Pekerjaan : Karyawan
Ibu : Fitriani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

DRAF WAWANCARA

PEMERINTAHAN DESA

Nama : **Muhammad Yusuf**

Umur : **45 Tahun**

Jabatan : **Kepala Desa**

Pendidikan : **SMA**

Jenis Kelamin : **Laki-Laki**

A. Tercapainya Tujuan

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Prosedur Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada Desa Aras dan Bagaimana Pemahaman Bapak/Ibu mengenai Alokasi Dana tersebut?

Jawaban: prosedurnya yang pertama pengajuan usulan terhadap pemkab dengan membuat rancangan anggaran biaya pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa lalu mengajukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di kabupaten lalu disalurkan ke keuangan barulah masuk ke rekening desa. kalau pemahamannya sama seperti prosedurnya.

2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: yang pertama apa-apa saja yang dikerjakan di Desa harus dilaporkan sesuai dengan anggaran yang sudah ada, sesuai dengan anggaran biaya juga.

3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara, jika ada Bagaimana cara mengatasi?

Jawaban: ada, cara mengatasinya dengan melakukan musyawarah desa

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana mekanisme dalam pencapaian tujuan program pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara??

Jawaban: tujuan utamanya yaitu untuk mempermudah masyarakat dengan adanya pembangunan yang dilakukan, mensejahterakan kehidupan masyarakat, dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat.

5. Menurut Bapak/Ibu, Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban: masih belum sesuai karena dengan dana yang cukup besar maka banyak pembangunan yang direncanakan sehingga ada beberapa pembangunan yang belum dilaksanakan.

B. Adanya Integrasi

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana respon masyarakat terhadap pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara dan Bagaimana bentuk dari pencapaian Pembangunan tersebut?

Jawaban: responnya bagus dengan pembangunan yang sudah dilaksanakan, namun disayangkan dengan pembangunan yang belum sempat dilakukan karena kekurangan biaya.

2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana upaya Pemerintah Desa agar adanya transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat Desa Aras?

Jawaban: yang pertama disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan setiap kegiatan ditempelkan di papan informasi. Karena Dana Desa itu wajib diketahui sama masyarakat.

3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah program yang dilaksanakan di Desa Aras dapat membantu dan memudahkan masyarakat yang ada di desa tersebut?

Jawaban: sangat membantu karena sebelum melaksanakan pembangunan masyarakat dikumpulkan lalu mengadakan musyawarah desa, dan masyarakat bisa melapor apa-apa saja yang harus dibangun di setiap dusun-dusun.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pendapat masyarakat tentang pengelolaan anggaran dana yang ada di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: ada beberapa pendapat yang mengarah ke hal negatif karena ada pembangunan yang belum dilaksanakan.

5. Menurut Bapak/Ibu, pembangunan apa saja yang sudah dilaksanakan di Desa Aras Kabupaten Batubara ini dan apakah pembangunan tersebut bermanfaat bagi masyarakat?

Jawaban: yang utama pembangunan infrastruktur seperti perabot beton, cleannig pembuangan limbah, pembangunan posyandu dll dan pembangunan disini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

C. Adanya Adaptasi

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana implementasi terhadap masyarakat mengenai program yang dilaksanakan maupun diterapkan di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: implementasinya semua kegiatan ditempel di papan informasi dan sebelum melaksanakan programnya musyawarah desa terlebih dahulu.

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada bentuk penyimpangan program yang akan dilaksanakan di Desa Aras dari Perda Kabupaten Batubara?

Jawaban: ada, misalnya ada kerusakan yang parah maka pembangunan itu yang harus didahulukan.

3. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tanggapan Masyarakat jika ada program yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan?

Jawaban: banyak yang mengarah negatif, terutama mengenai anggaran dana desa.

4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan penduduk setempat dalam melaksanakan program tersebut dan

berapa persen dari masyarakat Desa Aras yang ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan?

Jawaban: kerjasamanya apabila ada musyawarah, masyarakat hadir dan yang mengerjakan pembangunannya juga dari masyarakat sini juga tidak menggunakan tenaga kerja dari masyarakat luar. Untuk masyarakat disini yang ikut dalam pembangunan disini hampir 30%.

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang ada di Desa Aras ini aktif dalam memberikan ide-ide atau masukan dalam perencanaan program pembangunan? dan apakah masukan dari masyarakat diterima ataupun dilaksanakan dalam pembangunan di Desa Aras ini?

Jawaban: masyarakat selalu aktif dalam memberi masukan dan kalau masukan tersebut positif dapat diterima.

DRAF WAWANCARA

PEMERINTAHAN DESA

Nama : **Muhammad Yunus**

Umur : **23 Tahun**

Jabatan : **Kaur Umum/Keuangan**

Pendidikan : **SMK**

Jenis Kelamin : **Laki-Laki**

A. Tercapainya Tujuan

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Prosedur Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada Desa Aras dan Bagaimana Pemahaman Bapak/Ibu mengenai Alokasi Dana tersebut?

Jawaban: prosedurnya dari pemerintahan desa memberikan pengajuan kepada pemkab tentang anggaran desa dan pemahaman tentang alokasi dana hampir sama seperti prosedur, pemerintahan desa mengajukan kepada pemkab dan pemkab memberikan dana tersebut melalui transfer ke rekening desa.

2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: memberikan laporan yang akan ditempel dipapan informasi mengenai pembangunan yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan.

3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara, jika ada Bagaimana cara mengatasi?

Jawaban: kalau ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa cepat mengumpulkan masyarakat dan memberi tau kepada masyarakat agar dapat diatasi bersama-sama.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana mekanisme dalam pencapaian tujuan program pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara??

Jawaban: mensejahterakan kehidupan masyarakat desa

5. Menurut Bapak/Ibu, Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program pembangunan alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban: masih belum sesuai, masih ada beberapa program pembangunan yang belum tercapai.

B. Adanya Integrasi

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana respon masyarakat terhadap pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara dan Bagaimana bentuk dari pencapaian Pembangunan tersebut?

Jawaban: responnya bagus, bentuk pencapaiannya adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana upaya Pemerintah Desa agar adanya transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat Desa Aras?

Jawaban: membuat anggaran dana yang telah keluar dalam pembangunan desa dan meletakkannya di papan informasi.

3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah program yang dilaksanakan di Desa Aras dapat membantu dan memudahkan masyarakat yang ada di desa tersebut?

Jawaban: tentu saja karna pembangunan desa sendiri di laksanakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pendapat masyarakat tentang pengelolaan anggaran dana yang ada di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: bagus namun ada juga yang tidak bagus karena ada pembangunan yang masih belum dilaksanakan karena kekurangan anggaran dana desa.

5. Menurut Bapak/Ibu, pembangunan apa saja yang sudah dilaksanakan di Desa Aras Kabupaten Batubara ini dan apakah pembangunan tersebut bermanfaat bagi masyarakat?

Jawaban: bermanfaat, pembangunannya sendiri khususnya kepada infrastruktur.

C. Adanya Adaptasi

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana implementasi terhadap masyarakat mengenai program yang dilaksanakan maupun diterapkan di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: saling keterbukaan kepada masyarakat pada saat melaksanakan musyawarah desa.

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada bentuk penyimpangan program yang akan dilaksanakan di Desa Aras dari Perda Kabupaten Batubara?

Jawaban: ada misalnya ada pembangunan yang mendesak dan harus didahulukan pembangunan itu.

3. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tanggapan Masyarakat jika ada program yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan?

Jawaban: selalu mengarah ke yang negatif apalagi mengenai anggaran dana desa, ada sebagian masyarakat yang selalu sensitif dengan anggaran dana desa dan program pembangunannya.

4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan penduduk setempat dalam melaksanakan program tersebut dan berapa persen dari masyarakat Desa Aras yang ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan?

Jawaban: program pembangunan yang dilaksanakan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat desa sendiri bukan dari masyarakat luar, bisa dihitung sekitar 30% untuk masyarakat yang ikut berpartisipasi.

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang ada di Desa Aras ini aktif dalam memberikan ide-ide atau masukan dalam perencanaan

program pembangunan? dan apakah masukan dari masyarakat diterima ataupun dilaksanakan dalam pembangunan di Desa Aras ini?

Jawaban: aktif, kalau masukan yang positif dapat diterima dan dipertimbangkan kembali.

DRAF WAWANCARA

PEMERINTAHAN DESA

Nama : Fahmi
Umur : 31 Tahun
Jabatan : Tim Pelaksana
Pendidikan : SMA
Jenis Kelamin : Laki-Laki

A. Tercapainya Tujuan

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Prosedur Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada Desa Aras dan Bagaimana Pemahaman Bapak/Ibu mengenai Alokasi Dana tersebut?

Jawaban: membuat program yang akan dilaksanakan oleh desa dan mengajukan kepada pemkab ataupun kepada BPM (Badan Permusyawaratan Masyarakat) dan dari pemkab mengeluarkan anggaran dana desa tersebut melalui rekening desa.

2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pengeluaran anggaran dana desa.

3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara, jika ada Bagaimana cara mengatasi?

Jawaban: melakukan musyawarah desa untuk membahas kembali mengenai pembangunan di desa.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana mekanisme dalam pencapaian tujuan program pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara??

Jawaban: mengadakan musyawarah desa dan berdiskusi kepada masyarakat agar pembangunan di desa bisa mencapai pada tujuannya yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dan mengurangi angka kemiskinan.

5. Menurut Bapak/Ibu, Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program pembangunan alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban: masih belum sesuai, masih ada program yang belum sempat dilaksanakan.

B. Adanya Integrasi

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana respon masyarakat terhadap pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara dan Bagaimana bentuk dari pencapaian Pembangunan tersebut?

Jawaban: responnya baik meskipun ada beberapa program yang belum terlaksana. Bentuk pencapaiannya adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana upaya Pemerintah Desa agar adanya transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat Desa Aras?

Jawaban: selalu memberi tau lewat papan informasi yang ada di kantor kepala desa mengenai anggaran dana desa yang sudah keluar.

3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah program yang dilaksanakan di Desa Aras dapat membantu dan memudahkan masyarakat yang ada di desa tersebut?

Jawaban: cukup sangat membantu dan masyarakat senang dengan pembangunan yang dilaksanakan.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pendapat masyarakat tentang pengelolaan anggaran dana yang ada di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: masyarakat sangat sensitif dengan anggaran dana desa apalagi jika ada pembangunan yang sudah direncanakan tetapi belum terlaksana.

5. Menurut Bapak/Ibu, pembangunan apa saja yang sudah dilaksanakan di Desa Aras Kabupaten Batubara ini dan apakah pembangunan tersebut bermanfaat bagi masyarakat?

Jawaban: infrastruktur dan melaksanakan pembangunan posyandu sehingga masyarakat dalam keadaan darurat bisa datang ke posyandu yang ada di desa ini.

C. Adnya Adaptasi

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana implementasi terhadap masyarakat mengenai program yang dilaksanakan maupun diterapkan di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: pemerintah desa harus ramah kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui anggaran ataupun program yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada bentuk penyimpangan program yang akan dilaksanakan di Desa Aras dari Perda Kabupaten Batubara?

Jawaban: pasti ada karena pembangunan yang mendesak dan harus cepat ditangani.

3. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tanggapan Masyarakat jika ada program yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan?

Jawaban: jika ada program yang tidak sesuai pastinya masyarakat banyak yang komplain.

4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk kerjasama pemerintah desa dengan penduduk setempat dalam melaksanakan program tersebut dan berapa persen dari masyarakat Desa Aras yang ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan?

Jawaban: dalam pembangunan desa pemerintah mengajak warga untuk ikut dalam pembangunan ini sehingga tidak menggunakan tenaga kerja dari luar desa, kurang lebih 30 atau 40%.

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang ada di Desa Aras ini aktif dalam memberikan ide-ide atau masukan dalam perencanaan program pembangunan? dan apakah masukan dari masyarakat diterima ataupun dilaksanakan dalam pembangunan di Desa Aras ini?

Jawaban: cukup aktif, dan banyak ide-ide dari masyarakat yang mengarah ke positif.

DRAF WAWANCARA

Masyarakat

Nama : Sumini

Umur : 45 Tahun

Jabatan : Tokoh Agama

Pendidikan : SMA

Jenis Kelamin : Perempuan

A. Tercapainya Tujuan

1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah sudah tercapainya tujuan program pembangunan khususnya meningkatkan pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: masih belum tercapai, masih ada program pembangunan yang direncanakan dan belum dilaksanakan.

2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: pertanggungjawabannya setiap kegiatan yang dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan akan diberitahukan melalui papan informasi, sehingga masyarakat mengetahui setiap anggaran yang dikeluarkan.

3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara, jika ada Bagaimana cara mengatasi?

Jawaban: hambatan pasti ada namun kembali lagi kepada pemerintah desa bagaimana cara mengatasi itu semua. Jika dari pemerintah desa bertanggungjawab maka hambatan itu cepat teratasi.

4. Menurut Bapak/Ibu, Apa Tujuan Utama dari program pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

5. Menurut Bapak/Ibu, Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban: masih belum sesuai dengan apa yang direncanakan

B. Adanya Integrasi

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana respon masyarakat lain terhadap pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara dan Bagaimana bentuk dari pencapaian pembangunan tersebut?

Jawaban: bentuk pencapaian dari program yang direncanakan dan yang akan dilaksanakan dengan adanya kerjasama dari pemerintah desa dengan masyarakat.

2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana upaya Pemerintah Desa agar adanya transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat Desa Aras?

Jawaban: memberikan informasi anggaran dana yang sudah dikeluarkan melalui papan informasi.

3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah program yang dilaksanakan di Desa Aras dapat membantu dan memudahkan masyarakat yang ada di desa tersebut?

Jawaban: sangat membantu dan masyarakat senang dengan program yang sudah dikerjakan.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pendapat masyarakat tentang pengelolaan anggaran dana yang ada di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: masih mengarah kepada yang negatif terutama dengan pengelolaan anggaran dana desa.

5. Menurut Bapak/Ibu, pembangunan apa saja yang sudah dilaksanakan di Desa Aras Kabupaten Batubara ini dan apakah pembangunan tersebut bermanfaat bagi masyarakat?

Jawaban: sangat bermanfaat, pembangunan yang sudah dilaksanakan yaitu infrastruktur, pembangunan posyandu, perabot beton, dll.

C. Adanya Adaptasi

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana reaksi masyarakat terhadap program yang dilaksanakan maupun diterapkan di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: reaksi dari masyarakat senang dengan program yang telah dilaksanakan namun ada beberapa dari masyarakat yang kecewa dengan pembangunan yang belum dilaksanakan.

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada bentuk penyimpangan program yang akan dilaksanakan di Desa Aras dari Perda Kabupaten Batubara?

Jawaban: pasti ada, pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya masih terjadi penyimpangan dengan program yang telah dilaksanakan.

3. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tanggapan Masyarakat jika ada program yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan?

Jawaban: untuk program yang telah direncanakan masyarakat tidak ada ada komentar namun karena ada pembangunan yang tidak terlaksana maka masyarakat jadi banyak komentar dan kecewa.

4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan penduduk setempat dalam melaksanakan program tersebut dan berapa persen dari masyarakat Desa Aras yang ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan?

Jawaban: mengadakan musyawarah desa, yang mengerjakan program pembangunannya sendiri dari masyarakat setempat dan sekitar 20 atau 30% masyarakat yang aktif dalam program pembangunan.

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang ada di Desa Aras ini aktif dalam memberikan ide-ide atau masukan dalam perencanaan program pembangunan? dan apakah masukan dari masyarakat diterima ataupun dilaksanakan dalam pembangunan di Desa Aras ini?

Jawaban: cukup aktif, masyarakat juga sangat semangat dalam memberikan masukan, dan kalau masukan yang bagus bisa kami terima kalau yang tidak bagus ya tidak kami terima.

DRAF WAWANCARA

Masyarakat

Nama : Dedi Fahrizal Nasution, SE

Umur : 24 Tahun

Jabatan : Tokoh Pemuda Masyarakat

Pendidikan : S1

Jenis Kelamin : Laki-Laki

A. Tercapainya Tujuan

1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah sudah tercapainya tujuan program pembangunan khususnya meningkatkan pembangunan di Desa Arras Kabupaten Batubara?

Jawaban: belum tercapai masih ada pembangunan yang belum terlaksana.

2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: selalu memberikan informasi kepada masyarakat dalam pembangunan desa ini.

3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara, jika ada Bagaimana cara mengatasi?

Jawaban: dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti ada hambatan dan itu kembali kepada perangkat desa bisa atau tidak mengatasi hambatan tersebut terutama mengenai anggaran dana desa dan program pembangunannya.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana mekanisme dalam pencapaian tujuan program pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara??

Jawaban: adanya keterbukaan atau adanya saling diskusi antara perangkat-perangkat desa dengan masyarakat guna untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa ini sendiri.

5. Menurut Bapak/Ibu, Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program pembangunan alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Jawaban: masih belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

B. Adanya Integrasi

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana respon masyarakat terhadap pembangunan di Desa Aras Kabupaten Batubara dan Bagaimana bentuk dari pencapaian Pembangunan tersebut?

Jawaban: reseponnya baik dengan pembangunan yang sudah dilaksanakan namun ada juga yang tidak baik dengan program pembangunan yang belum dilaksanakan.

2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana upaya Pemerintah Desa agar adanya transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat Desa Aras?

Jawaban: setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa akan menempelkan di papan informasi yang ada di desa.

3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah program yang dilaksanakan di Desa Aras dapat membantu dan memudahkan masyarakat yang ada di desa tersebut?

Jawaban: sangat untuk membantu semua pembangunan di desa ini.

4. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pendapat masyarakat tentang pengelolaan anggaran dana yang ada di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: pendapatnya bagus dengan pembangunan yang sudah dilaksanakan dan untuk pembangunan yang belum dilaksanakan sangat mengarah kepada yang negatif.

5. Menurut Bapak/Ibu, pembangunan apa saja yang sudah dilaksanakan di Desa Aras Kabupaten Batubara ini dan apakah pembangunan tersebut bermanfaat bagi masyarakat?

Jawaban: lebih di fokuskan ke infrastruktur, tapi untuk pembangunan infrastruktur jalan di desa ini belum dilaksanakan.

C. Adanya Adaptasi

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana reaksi masyarakat terhadap program yang dilaksanakan maupun diterapkan di Desa Aras Kabupaten Batubara?

Jawaban: pastinya reaksi dari masyarakat senang karena akan dilaksanakan pembangunan di daerah mereka tetapi jika pembangunan itu tidak jadi dilaksanakan maka masyarakat sangat kecewa.

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada bentuk penyimpangan program yang akan dilaksanakan di Desa Aras dari Perda Kabupaten Batubara?

Jawaban: bentuk penyimpangan dari apa yang sudah direncanakan tentu ada.

3. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana tanggapan Masyarakat jika ada program yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan?

Jawaban: pastinya masyarakat akan banyak yang tidak terima jika ada pembangunan yang tidak sesuai.

4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk kerjasama pemerintah desa dengan penduduk setempat dalam melaksanakan program tersebut dan berapa persen dari masyarakat Desa Aras yang ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan?

Jawaban: pemerintah desa cukup menggunakan tenaga kerja masyarakat desa ini sendiri.

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat yang ada di Desa Aras ini aktif dalam memberikan ide-ide atau masukan dalam perencanaan program pembangunan? dan apakah masukan dari masyarakat diterima ataupun dilaksanakan dalam pembangunan di Desa Aras ini?

Jawaban: bisa dibilang cukup aktif, mungkin karena banyak sekali pembangunan yang ada di desa ini yang sudah rusak sehingga masyarakat ingin diperbaiki pembangunan tersebut.